

BANGUNAN SMPN 2 BANGUNTAPAN RUNTUH

Komisi D: Kami Masih Bisa Menganggarkan



Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman, meninjau SMPN 2 Banguntapan Bantul.

BANTUL (KR) - Komisi D DPRD Bantul melakukan inspeksi mendadak ke SMPN 2 Banguntapan Bantul, Rabu (15/11). Tinjauan itu dilaksanakan pascaruntuhnya bangunan sekolah Selasa lalu. Sementara pihak sekolah berharap segera ada tindak-lanjut terkait dengan perbaikan. Mengingat bangunan SMPN 2 Banguntapan didirikan dekade tahun 1981-an.

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman, mengatakan jika peninjauan sekolah dilakukan setelah kerusakan di salah satu bangunan sekolah. "Saya selalu minta kepala SD, SMP, TK, PAUD, yang perlu diperhatikan dan mendesak segera diperbaiki. Itu penting karena semua membutuhkan proses dalam penganggaran," ujar Suratman didampingi Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Drs Ahmad Agus Sofwan MPdI dan anggota Komisi D DPRD Bantul, Padmini Karyanti. Dalam kunjungan tersebut Komisi D juga diterima Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Emaniar Rahma Kirana, dan Kepala SMPN 2 Banguntapan, Purwanto. Suratman juga akan berusaha menganggarkan untuk perbaikan kerusakan di sekolah tersebut. "Tetapi kami sudah langsung melihat kondisi bangunan, dan memang sudah saatnya dilakukan rehap. Kami masih bisa menganggarkan untuk perbaikan dari kerusakan

peristiwa kemarin," ujarnya. Komisi D, kata Suratman, juga akan segera Koordinasi dengan dinas terkait dengan perbaikan sekolah yang mesti disegerakan. Artinya, jangan sampai ambruknya bangunan sekolah berakibat fatal. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Drs Ahmad Agus Sofwan MPdI, mengatakan keamanan sekolah hal paling utama. Jangan sampai terlihat indah hanya bagian depan, tetapi semua sudut sekolah juga mesti terjaga keamanannya. (Roy)-f

LAKUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu Bantul Libatkan Disabilitas

BANTUL (KR) - Bawaslu Bantul melibatkan kelompok disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, Selasa (14/11), mengatakan pihaknya gencar melakukan kolaborasi sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok disabilitas, di antaranya disabilitas netra dan disabilitas fisik yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Menurut Didik, kelompok disabilitas ini didorong untuk aktif dalam pengawasan partisipatif terutama menjelang masa kampanye yang akan dimulai tanggal 28 November 2023 mendatang. Beberapa isu kerawanan dalam masa kampanye seperti politik uang, politisasi SARA, in-

formasi hoax serta ujaran kebencian menjadi hal yang perlu diperhatikan pemilih disabilitas. Selain itu juga diingatkan untuk berhati-hati menggunakan media sosial karena menjelang masa kampanye ini tentunya akan banyak informasi-informasi yang mengarah pada upaya untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. "Bawaslu Bantul berharap kelompok penyandang disabilitas untuk pro aktif menjadi pemilih yang aktif, cerdas dan rasional dalam Pemilu 2024," ungkap Didik. Pada kesempatan yang sama Ketua Ikatan Tuna Netra Indonesia (ITMI) Bantul, Slamet Raharjo, menyampaikan pengalamannya sebagai pemilih pada Pemilu 2019 yang



Sosialisasi tentang pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Disabilitas.

lalu masih ditemui TPS yang kurang akses terhadap penyandang disabilitas. Karena itu dia berharap kepada penyelenggara Pemilu agar memperhatikan aksesibilitas TPS terutama untuk penyandang disabilitas dan kelompok jompo. Selain itu diperlukan juga keterampilan komunikasi penye-

lenggara pemilu di TPS pada saat melayani pemilih disabilitas. "Hal ini penting karena masih sering ditemui penyelenggara pemilu di TPS yang kurang paham cara-cara berkomunikasi atau melayani pemilih disabilitas baik itu netra, fisik, tunarungu dan lainnya," tandas Slamet. (Jdm)-f

KABUPATEN
BANTUL

PROGRAM UNGGULAN H ABDUL HALIM MUSLIH -JOKO PURNOMO

933 Padukuhan di Bantul Dapat Rp 50 Juta

BANTUL (KR)-Pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengulirkan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) dibawah kepemimpinan duet Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo. Sejak dijalankan tahun 2022, PPBMP memberikan suntikan dana segar Rp 50 juta setiap padukuhan per tahun. Merujuk data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul. Sebanyak 933 padukuhan di Bantul menerima program tersebut dengan alokasi anggaran Rp 46,650 miliar. Tahun 2023 mendatang, merupakan tahun ke tiga PPBMP kembali dijalankan. Tiga aspek bisa ditopang dengan dana Rp 50 juta itu, mulai pendidikan, kesehatan dan bidang lingkungan. Program tersebut diharapkan bisa memacu spirit masyarakat dalam melakukan pembangunan dan memberikan dampak kemajuan lebih besar.

Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo, mengatakan, PPBMP itu merupakan hasil dari diskusi bersama sejumlah lapisan masyarakat. Kemudian hal tersebut kita tuangkan ketika membuat visi/ misi Pilkada tahun 2019. "Kenapa program itu waktu itu kita usulkan. Karena begini, persoalan di padukuhan di wilayah Kabupaten Bantul ini yang paling ngerti dan tahu itu sebetulnya adalah masyarakat ditingkat padukuhan," ujar Joko Purnomo.

Sementara didalam padukuhan tersebut ada seorang kepala dukuh. "Maka ketika padukuhan-padukuhan itu bisa menginventarisir kebutuhan pembangunannya, apakah infrastrukturnya, apakah bidang kesehatannya, apakah bidang pendidikannya. Maka didalam sebuah kegiatan musyawarah padukuhan itu sudah bisa membuat sebuah kesimpulan apa kebutuhan riil ditengah masyarakat," ujarnya.

Dengan skema program tersebut, paling tidak ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum bisa merata karena keterbatasan anggaran. Sehingga belum semua padukuhan bisa merasakan pembangunan lewat APBD. "Dengan adanya PPBMP di tingkat padukuhan, dulu saya menyampaikannya Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Tetapi kemampuan APBD Bantul kita hari ini baru Rp 50 juta," ujar Joko Purnomo.

Joko Purnomo mengungkapkan, untuk

tahun ini dalam PPMBP fokus untuk bidang pendidikan. Artinya dengan alokasi tersebut bisa untuk mendorong dan mendukung di-bidang PAUD. "Kemudian juga untuk bidang kesehatan bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan Posyandu dan kesehatan dilingkup padukuhan," jelas Joko. Kemudian ketiga adalah memberikan fasilitasi kepada anak-anak ditingkat padukuhan adalah sebagai salah satu pendukung program Kabupaten Bantul layak anak. Tidak hanya itu, PPMBP juga diperuntukkan untuk pengelolaan sampah di tingkat padukuhan.

"Ketika empat program itu step by step dilaksanakan dengan, maka kedepan akan terwujud kabupaten Bantul yang sangat sejahtera. Dengan bidang pendidikan , kesehatan dan lingkungan hidup bisa ditingkatkan kualitasnya," jelas Joko Purnomo.

Joko mengatakan, program alokasi anggaran PPBMP salah satunya untuk pengelolaan sampah rumah tangga ditingkat padukuhan. Hal tersebut menjadi sangat penting ketika kabupaten Bantul punya program unggulan Bantul bersih sampah tahun 2025. Sehingga tidak ada pilihan lain mulai dari masyarakat tingkat padukuhan, kalurahan, kapanewon, Kabupaten menyamakan satu pandangan untuk mewujudkan Bantul bersih sampah. Joko Purnomo optimis bila semua elemen masyarakat punya komitmen sama tidak mustahil tahun 2025 Bantul bersih sampah bisa terwujud. "Dalam penanganan sampah di masyarakat tidak bisa pemerintah berjalan sendiri. Harus melibatkan semua elemen masyarakat dari tingkat padukuhan, kalurahan, kapanewon dan pemerintah Kabupaten Bantul," ujarnya.

Joko Purnomo berharap, dengan adanya PPMBP menjadi penopang berbagai kegiatan unggulan dan strategis di masyarakat. Artinya program-program yang penting akan terselesaikan dengan adanya kucuran bantuan dari pemerintah Rp 50 juta/ tahun itu.

Selain itu khusus di bidang kesehatan memang sangat penting. Artinya Pemerintah Kabupaten Bantul komitmen bagaimana memikirkan ke depan di Bantul lahir generasi sehat, cerdas berakhlak mulia. Oleh

karena, itu tidak ada pilihan lain aspek-aspek pendukung kesehatan mesti diperhatikan serius. Mulai dari level padukuhan, kalurahan, kapanewon hingga Kabupaten. Di-antaranya peningkatan kapasitas kader kesehatan, penurunan angkatan stunting,

PPBMP

PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

Ruang Lingkup PPBMP

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan non formal
(Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Penitipan Anak)

Bidang Kesehatan (Posyandu)

Bidang lingkungan hidup (pengelolaan Sampah Rumah Tangga)

Bidang PAUD formal dan non formal (TK, KB, SPS, dan TPA)

Pengadaan Alat Peraga Edukatif, dan sarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lainnya

Pemeliharaan/rehab/penyempurnaan bangunan

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik; dan/atau

Kegiatan mewujudkan Kampung Layak Anak di Padukuhan, antara lain:

Sosialisasi perlindungan anak

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

Pembentukan dan pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat (PATBM)

Deklarasi kampung ramah anak

BUPATI KABUPATEN BANTUL
H. ABDUL HALIM MUSLIH

WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL
JOKO PURNOMO